

**DATA PERBANDINGAN DIP DAN DIK DI SELURUH BADAN PUBLIK  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

<b>No.</b>	<b>Nama Badan Publik</b>	<b>Jumlah DIP</b>	<b>Jenis Informasi DIP Utama</b>	<b>Jumlah DIK</b>	<b>Jenis Informasi yang Dikecualikan</b>
1.	Dinas Kominfo Prov. Sultra	18	Profil pejabat, program kerja, anggaran, regulasi	7	Informasi sistem keamanan siber, IP Server
2.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. Sultra	2	Program atau kegiatan dan realisasi kegiatan beserta capainnya	7	Hasil Uji Kompetensi PNS, Naskah Ujian Calon Pimpinan, Kunci Sistem Sandi, Dokumen Proses Barang/Jasa Pemerintah, LPSE
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sultra	1	Laporan Keuangan	7	Status Kepemilikan tanah, Sertifikat tanah, LKPD, Data Barang Milik Daerah, Data maupun dokumen pemindah tanganan dengan cara hibah atau dan tukar menukar, Draf Ringkasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
4.	Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Prov. Sultra	1	Profil Badan Publik	29	Disposisi Pimpinan, Arsip atau Dokumen naskah dinas, surat-surat atau laporan, hasil rapat, peta lokasi, lokasi server, kode akses elektronik, sistem keamanan, sistem keamanan database, alat bukti kasus, opini hukum, proses

					hukum pegawai yang bermasalah,Internet Protocol, data dan user,laporan pajak pribadi
5.	Biro Hukum Setda Prov. Sultra	1	Peraturan/Keputusan atau Kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik	29	Disposisi Pimpinan,Arsip atau Dokumen naskah dinas,surat-surat atau laporan,hasil rapat,peta lokasi,lokasi server,kode akses elektronik, sistem keamanan,sistem keamanan database,alat bukti kasus,opini hukum,proses hukum pegawai yang bermasalah,Internet Protocol, data dan user,laporan pajak pribadi
6.	Inspektorat	1	Tata Cara Pengaduan	7	Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan, Data Pengaduan Masyarakat,Hasil Investigasi dugaan pelanggaran disiplin atau tindak pidana,dokumen,nota dinas internal,risalah rapat tertutup atau surat menyurat bersifat rahasia
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Ketenagakerjaan	7	Data Pelaporan Perusahaan, Identitas Pelapor atau pengadu,laporan hasil pengawasan ketenagakerjaan,

					rencana strategis atau program transmigrasi yang belum disahkan,dokumen hasil evaluasi kinerja lembaga pelatihan kerja dan surat menyurat yang bersifat rahasia antar instansi
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sultra	2	Prosedur Peringatan dini dan prosedur evaluasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik	6	Rencana Kontinjensi dan rencana operasi penanggulangan bencana, data lokasi rawan bencana,informasi identitas, laporan hasil investigasi,surat-menyurat dan dokumen lelang/logistik bantuan yang belum diumumkan resmi
9.	Dinas Sosial Prov. Sultra	1	Penanganan dampak sosial dan ekonomi	6	Data Pribadi penerima bantuan sosial (bansos), identitas dan laporan petugas lapangan atau pengadu kasus sosial,dokumen asesmen individu/keluarga,rencana dan evaluasi penyalur bansos yang belum final,surat-menyurat atau lembaga dan hasil audit atau pemeriksaan internal penyaluran bantuan sosial
10.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Sultra	1	Jenis-Jenis Pengadaan Barang dan Jasa	7	Dokumen Penawaran peserta lelang (vendor),berita acara

					<p>evaluasi teknis dan harga, identitas tim pokja atau pejabat pengadaan sebelum pelaksanaan lelang selesai, dokumen internal penunjukkan penyedia melalui penunjukan langsung atau e-purchasing, surat sanggahan atau sanggahan banding dari peserta lelang, catatan hasil audit pengadaan yang belum ditetapkan secara resmi oleh Inspektorat dan BPK dan Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa untuk tahun berjalan yang belum disahkan.</p>
--	--	--	--	--	---